

KONTRIBUSI USAHA PETERNAKAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Hanny Siagian

STIE Mikroskil

Jl. Thamrin No. 112, 124, 140 Medan 20212

hanny@mikroskil.ac.id

Abstrak

Usaha peternakan memberi kontribusi terhadap penyediaan produksi ternak, peningkatan pendapatan peternak, perluasan dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR antara industri peternakan (perusahaan) sebagai inti dengan peternak sebagai plasma merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan mempercepat pencapaian target pembangunan sub sektor peternakan yang merupakan bagian dari tujuan pengembangan wilayah. Tulisan ini menyajikan kontribusi usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR dalam pengembangan wilayah. Berdasarkan hasil suatu penelitian tentang peranan usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR ayam ras pedaging dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa indeks LQ (*Location Quotient*) > 1 yang berarti bahwa eksistensi usaha peternakan termasuk kegiatan usaha berbasis di dalam peningkatan pendapatan (Produk Domestik Regional Bruto) di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR di Kabupaten Deli Serdang menjadi andalan dalam pembangunan wilayah.

Kata kunci: *usaha peternakan, pengembangan wilayah*

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, berkelanjutan dan terarah untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan hendaknya tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sering tidak seiring dengan upaya pengurangan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga diukur dari keberhasilan usaha perbaikan dalam redistribusi pendapatan masyarakat dan pengurangan kelompok miskin di dalam anggota masyarakat.

Salah satu andalan sektor pertanian di Indonesia adalah sub sektor peternakan yang pengembangannya mengacu pada strategi dasar dan tujuan pembangunan peternakan mengingat prospeknya cerah baik untuk tujuan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Strategi pembangunan peternakan (Yasin dan Indarsih, 1988) yaitu:

1. Peningkatan produksi yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi usaha.
2. Peningkatan kerja sama yang saling mendukung dan saling mendorong untuk maju antara sub sektor peternakan dan sub sektor lainnya.
3. Peningkatan peranan untuk terwujudnya pembangunan wilayah yang utuh, serasi dan terpadu.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pengembangan Wilayah

Kegiatan pembangunan pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata. Ditinjau dari proses pelaksanaan pembangunan, usaha pembangunan tersebut pada dasarnya berupa peningkatan manfaat sumber daya dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Produk kegiatan manusia diusahakan untuk memberikan pengaruh positif pada suatu wilayah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kawasan-kawasan yang ada di dalamnya, baik peningkatan mutu, luas maupun jumlah. Peningkatan kawasan-kawasan tersebut memberikan kontribusi kepada perkembangan wilayah tersebut, sehingga proses peningkatan kawasan pada dasarnya merupakan gambaran dari proses perkembangan suatu wilayah (Nasoetion dan Rustiadi, 1990). Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai upaya menata ruang dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Tujuan pengembangan wilayah ialah pembangunan wilayah itu sendiri dalam arti bahwa kondisi wilayah menjadi lebih baik di segala sektor yang meliputi sektor jasa, industri dan pertanian (peternakan), paling tidak di segi pengelolaan hasil pertanian dan penerimaan masyarakat atau di segi pengeluaran konsumsi, investasi serta ekspor impornya. Selanjutnya diharapkan agar kegiatan perekonomian wilayah itu membuka kesempatan kerja lebih banyak, sehingga tercapainya pemerataan disegala bidang dalam kehidupan wilayah (kota dan desa). Selain itu tujuan pengembangan wilayah adalah agar kegiatan kota dan daerah sekitarnya itu seimbang serta berkembang dalam fungsinya sebagai tempat pelayanan warga kota dan daerah sekitarnya (Reksohadiprodjo dan Karseno, 1994).

Pengembangan wilayah harus dapat menunjang wilayah belakangnya (*hinterland*) serta tidak menjadi parasit dalam menyerap potensi daerah belakangnya. Hubungan pusat pengembangan wilayah dengan wilayah belakangnya harus bersifat sinergis. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, disusun strategi pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat menunjang pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat (Hanafiah, 1982).

2.2. Usaha Peternakan

Usaha peternakan merupakan kegiatan andalan di negara berkembang terutama negara agraris yang sangat potensial untuk dikembangkan baik pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan (*rural*) maupun pinggir kota (*sub urban*).

Untuk usaha peternakan yang baik, peternak dituntut 2 syarat pokok yaitu (AAK, 1982):

1. Menguasai *breeding* (memilih bibit yang unggul), *feeding* (cara memberi makanan yang baik), manajemen (cara memelihara yang baik), pencegahan dan pemberantasan penyakit.
2. Memiliki jiwa peternak. Seorang peternak dikatakan mempunyai jiwa peternak apabila ia telah mampu bertindak dalam usahanya secara tekun, disiplin dan tidak pernah putus asa didalam menghadapi kesulitan apapun.

Rahardi dkk. (1996) mengemukakan bahwa peranan peternakan dapat bersifat:

1. Langsung, terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produksi peternakan secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan peternak baik dalam bentuk usaha sampingan maupun sebagai usaha pokoknya.
2. Tidak langsung, meliputi:
 - a. Dapat menggerakkan kegiatan perekonomian sektor pertanian karena output (faktor produksi) dari sektor tersebut merupakan input bagi peternakan seperti pakan.

- b. Penyediaan bahan baku bagi sektor industri yaitu industri pengolahan sapronak sebagai pemakai produk sektor industri lainnya (industri bibit ternak, pakan, obat-obatan). Peningkatan produksi peternakan secara tidak langsung dapat merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daerah secara keseluruhan akibat pengaruhnya terhadap kegiatan perekonomian sektor lainnya yang terkait.
- c. Devisa melalui kegiatan ekspor.
- d. Substitusi impor peternakan.

Usaha peternakan terutama ayam ras dikelola dengan pendekatan pola kemitraan yang diatur dalam SK Menteri Pertanian No. 472 tahun 1996 tentang Bentuk Kemitraan PIR dan Pengelola. Pola kemitraan ini disebut Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yaitu sebuah model kerjasama tertutup antara pengusaha sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Pengusaha yang bertindak sebagai inti biasanya menyediakan bibit, pakan dan obat-obatan, sementara peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja untuk mengelola manajemen produksi. Setelah masa produksi selesai, hasilnya dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati. Yasin dan B. Indarsih (1988) menyatakan bahwa jaminan pemasaran yang mantap akan mendorong kegairahan dalam berusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan peternak khususnya peternak kecil. Oleh karena itu perlu tetap dukungan dan kerja sama yang baik diantara berbagai pihak yang terkait.

2.3. Eksistensi Usaha Peternakan

Siagian (2001) meneliti tentang peranan usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR ayam ras pedaging dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang diperoleh bahwa eksistensi usaha peternakan yang dikelola dengan pola kemitraan PIR memberi kontribusi dalam:

1. Memasok produksi ayam ras pedaging.

Produksi ternak ayam ras pedaging yang hidup sampai dipasarkan sebanyak 701.337 ekor (rata-rata 1,72 kg/ekor) yang dipelihara oleh 106 peternak. Bila selama 1 tahun dapat dilakukan 6 periode pemeliharaan, maka produksi dicapai sebanyak 4.208.022 ekor. Jumlah ini bila dikonversi ke berat badan diperoleh sebanyak 7.237.780 kg (4.208.022 ekor x 1,72 kg/ekor).

Mengacu pada populasi ternak ayam ras pedaging di Kabupaten Deli Serdang tahun 2001 sebanyak 16.246.440 ekor, maka usaha peternakan dengan pola kemitraan PIR tersebut memberi kontribusi produksi ternak ayam ras pedaging sebesar $(4.208.022 \text{ ekor} / 16.246.440 \text{ ekor}) \times 100\% = 25,90\%$. Kontribusi ini dapat ditingkatkan apabila:

- a. Peternak mampu menekan seminim mungkin persentase mortaliti ternak ayam ras pedaging.
- b. Bertambahnya jumlah peternak peserta dalam pola kemitraan PIR ternak ayam ras pedaging.
- c. Meningkatnya pendapatan peternak yang dapat ditabung (diinvestasikan) untuk mengembangkan usaha (meningkatkan skala usaha).

2. Peningkatan pendapatan peternak.

Tingkat pendapatan peternak ditentukan oleh efisiensi pemberian pakan yang dapat dilihat dari FCR (*Feed Conversion Ratio*) aktual dan persentase mortaliti ternak. Rata-rata FCR aktual pada satu periode pemeliharaan yang diperoleh peternak peserta sebesar 1,856 (lebih kecil dari FCR standar = 1,865) dan rata-rata persentase mortaliti ternak ayam ras pedaging sebesar 4,58% (lebih kecil dari persentase mortaliti ternak ayam ras pedaging standar = 5,49%).

Peternak akan mendapat keuntungan plus dari hasil penjualan bila FCR aktual dan persentase mortaliti ternak di bawah standar dan obat hemat, maka insentif bonus diperoleh dari selisih FCR standar dengan FCR aktual. Dengan demikian berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan peternak.

Jumlah peternak yang memperoleh FCR aktual dengan persentase mortaliti ternak di bawah standar ada sebanyak 62 (58,49) peternak, sehingga mendapat insentif bonus yang pada akhirnya menambah pendapatan peternak. Peternak yang belum mendapat insentif bonus agar memperbaiki manajemen pemeliharaan agar FCR aktual dan tingkat mortaliti di bawah standar. Untuk pencapaian ini dibutuhkan pembinaan yang intens dari inti (pengusaha/pengelola usaha peternakan pola kemitraan PIR).

3. Penyerapan tenaga kerja.

Tenaga kerja pada usaha peternakan terdiri atas: tenaga kerja tetap (anak kandang) dibutuhkan 1 orang untuk tiap 5.000 ekor, sedangkan tenaga kerja tidak tetap dibutuhkan 3 - 5 orang untuk tiap 5.000 ekor. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada sebanyak 607 orang (168 orang tenaga kerja tetap dan 439 orang tenaga kerja tidak tetap) untuk memelihara populasi ternak sebanyak 735.000 ekor untuk satu periode pemeliharaan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama kurun waktu 1 tahun (6 periode pemeliharaan) sebanyak $6 \times 607 \text{ orang} = 3.642 \text{ orang}$. Jumlah tenaga kerja ini bila dibanding dengan jumlah tenaga kerja sub sektor peternakan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2001 memberi kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 1,44% ($(3.642 \text{ orang}/252.177 \text{ orang}) \times 100\%$). Walaupun kontribusi penyerapan tenaga kerja terlihat kecil, namun dengan bertambahnya peternak akan memberi implikasi terhadap pertambahan penyerapan tenaga kerja yang tidak hanya tenaga kerja untuk memelihara ternak melainkan secara tidak langsung akan menambah jumlah tenaga kerja di luar usaha peternakan untuk keperluan penyediaan sarana produksi peternakan seperti bibit, pakan, obat-obatan, peralatan kadang, pemasaran dan pengolahan hasil ternak.

4. Basis perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Model basis ekonomi merupakan suatu metode untuk dapat mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Model ini banyak dipakai untuk menganalisis mengenai peranan sektor usaha pada suatu wilayah.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha peternakan pola kemitraan PIR termasuk kegiatan basis atau non basis di dalam perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara digunakan pendekatan metode LQ (*Location Quotient*) berdasarkan indikator pendapatan wilayah (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). LQ ini mengukur konsentrasi suatu kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan membandingkan peranannya dalam perekonomian wilayah yang lebih luas (Kadaria, 1985). Bila $LQ > 1$, maka kegiatan usaha peternakan tersebut merupakan sektor basis dan bila nilai $LQ < 1$, maka kegiatan usaha peternakan tersebut merupakan sektor non basis. Pada Tabel 1 tertera bahwa PDRB sub sektor peternakan di Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara meningkat selama kurun waktu 4 tahun (1996 - 1999). Meningkatnya PDRB Kabupaten Deli Serdang disebabkan meningkatnya kebutuhan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan perhitungan LQ diperoleh bahwa $LQ > 1$, hal ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan menjadi sektor basis karena adanya surplus produksi ternak di Kabupaten Deli Serdang yang didistribusikan ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didukung khusus untuk produksi ayam ras pedaging di Kabupaten Deli Serdang memberi kontribusi rata-rata sebesar 91,36% per tahun dari total kebutuhan produksi ayam ras pedaging di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. PDRB Sub Sektor Peternakan Di Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara serta Indeks LQ (*Location Quotient*)

Tahun	PDRB Kabupaten Deli Serdang (juta rupiah)		PDRB Provinsi Sumatera Utara (juta rupiah)		LQ	Model Basis Ekonomi
	Usaha Peternakan (Yij)	Total (Yj)	Usaha Peternakan (Yi)	Total (Y)		
1996	119.057,61	3.087.153,35	672.101,57	28.173.100,90	1,61	Basis
1997	131.211,78	3.501.196,86	980.313,78	34.006.274,64	1,30	Basis
1998	159.281,16	5.375.683,78	1.393.670,93	50.705.973,10	1,07	Basis
1999	189.701,47	6.012.473,15	1.816.843,21	61.957.660,99	1,08	Basis

3. Kesimpulan

1. Kegiatan usaha peternakan khususnya dengan pola kemitraan PIR ayam ras pedaging mampu memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya, produksi ternak, pendapatan peternak, penyerapan tenaga kerja yang membawa pengaruh terhadap pengembangan wilayah. Usaha yang menjurus pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat menunjukkan telah berlangsungnya proses pengembangan wilayah.
2. Mengingat keberadaan usaha peternakan berbasis pada pola kemitraan PIR nyata memberikan keuntungan, oleh karena itu perlu pengembangan pola ini sesuai dengan konsep tata ruang wilayah tanpa mengabaikan hubungan dan peranannya terhadap sektor lain sebagai titik tumpu pertumbuhan ekonomi.
3. Peternak harus mampu mengelola usaha peternakan dengan baik dalam upaya efisiensi pemberian pakan dan menekan angka mortaliti ternak.

Referensi

- [1] AAK., 1982, *Pedoman Beternak Ayam Negeri*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- [2] Hanafiah, T., 1982, *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- [3] Nasoetion, Rustiadi, 1990, *Kebijakan Pengembangan Wilayah Melalui Industrialisasi Pedesaan Nasional, Makalah Seminar Nasional Pembangunan Desa Secara Terpadu*. IPB. Bogor.
- [4] Reksohadiprodjo, S., Karseno, 1994, *Ekonomi Perkotaan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [5] Rahardi, F., I. S. Wibawa, R.N. Setyowati, 1996, *Agribisnis Peternakan*, Penerbit Swadaya, Jakarta.
- [6] Siagian, H., 2001, *Peranan Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah (Studi Kasus Pola Kemitraan PIR Peternakan Ayam Ras Pedaging PT Nusantara Unggas Jaya Di Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.
- [7] Yasin S., B. Indarsih, 1988, *Seluk Beluk Peternakan. Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit Anugrah Karya, Jakarta.